Katalog: 2303003.19

PROFIL KETENAGAKERJAAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGUSTUS 2019

https://babel.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROFIL KETENAGAKERJAAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

AGUSTUS 2019

https://babel.bps.go.id

PROFIL KETENAGAKERJAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG AGUSTUS 2019

ISBN: 978-602-5402-70-8

Nomor Publikasi: 19520.2002

Katalog BPS: 2303003.19

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: x + 36 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

https://babel.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	:	Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si
Editor	:	Harjo Teguh Ilmiana, S.Si, MM
		Bambang Sri Yuwono, S.Si, M.Si
		Aja Nasrun, SST, M.Sc
		Desiana Arbani Safari, SST, MAP
Penulis	:	Sohidin, SST
		Uluan Raja Sitorus, SST
		Femmy Ristia, SST
		Nur Jannah Mega Anindiata, SST
Gambar Kulit	:	Uluan Raja Sitorus, SST

https://babel.bps.go.id

https://babel.bps.go.id

Kata Pengantar

Informasi yang lengkap dan terpercaya mengenai kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan adanya data dan informasi tentang tenaga kerja yang berkesinambungan dapat menjadi suatu acuan dalam menentukan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Publikasi Profil Ketengakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2019, merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Publikasi ini bersumber dari data Sakernas Agustus Tahun 2019 dan dikemas sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kami mengharapkan saran dan masukan dari pengguna publikasi untuk perbaikan edisi berikutnya.

https://babel.bps.go.id

Pangkalpinang, April 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si, M.Si

https://babel.bps.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vii**

Daftar Tabel ..... **viii**

Daftar Gambar ..... **ix**

Bab I. Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Maksud dan Tujuan 4

1.3 Ruang Lingkup Penulisan 4

1.4 Sistematika Penyajian 5

1.5 Metode Survei 5

1.5.1 Ruang Lingkup Survei 5

1.5.2 Kerangka Sampel Survei 5

1.5.3 Rancangan Sampel 6

1.5.4 Pemutakhiran Frame Rumah Tangga 6

1.5.5 Metode Pengumpulan Data 7

1.5.6 Pengolahan Data 7

1.6 Konsep dan Definisi 7

Bab II. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ..... **15**

2.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja 17

2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 21

2.2 Pendidikan Pekerja 22

2.3 Kontribusi Sektor 24

2.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan 27

2.5 Pengangguran 29

2.5.1 Penganguran Terbuka 29

2.5.2 Penganguran Terdidik 31

2.5.3 Setengah Pengangguran 32

Bab III. Ringkasan **33**

https://bangka.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Batasan Kegiatan Informal 13

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 19

Tabel 3. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 23

Tabel 4. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 26

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 28

Tabel 6. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 32

https://babel.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 18

Gambar 2. Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 19

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 21

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 22

Gambar 5. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2019 24

Gambar 6. Kontribusi Sektor dalam Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 25

Gambar 7. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 27

Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 30

Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019 31

https://babel.bps.go.id

https://babel.bps.go.id

SAKERNAS AGUSTUS 2019

Survei Angkatan Kerja Nasional

1

DEFINISI

Survei yang dilaksanakan oleh BPS yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang menggambarkan ketenagakerjaan

TUJUAN

Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan

WAKTU PENCACAHAN

8-31 Agustus 2019

JUMLAH SAMPEL

3.621 Rumah Tangga

DATA YANG DIKUMPULKAN

Partisipasi Sekolah, Tingkat Pendidikan, Kegiatan Seminggu yang lalu, Pekerjaan utama, dan Pekerjaan Tambahan

INDIKATOR HASIL

Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), Bukan Angkatan Kerja (BAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

https://babel.bps.go.id

https://babel.bps.go.id

I.Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan data dan informasi yang akurat serta terpercaya dalam perencanaan pembangunan daerah sudah dirasakan sejak lama, salah satunya data mengenai ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan merupakan data yang penting bagi para pengambil kebijakan baik secara nasional maupun daerah terkait upaya program pembangunan nasional secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat melalui beberapa faktor pendekatan diantaranya adalah aspek penciptaan lapangan pekerjaan baru. Tersedianya lapangan pekerjaan baru dapat membuka peluang pekerjaan dan menambah kesempatan kerja, yang secara tidak langsung diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan penduduk di suatu wilayah.

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan modal pembangunan, meskipun sekaligus dapat pula menjadi beban dalam pembangunan tergantung dari potensi dan penggunaannya. Secara umum permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah tingginya laju angkatan kerja, rendahnya mutu tenaga kerja dan rendahnya laju kesempatan kerja yang tersedia. Tingginya laju angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan laju penciptaan lapangan kerja akan mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran, dan mutu tenaga kerja yang rendah akan mempersulit penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya penghasilan.

Data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data dapat berupa data mentah atau data yang telah diolah menjadi informasi yang lebih bermakna. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel atau grafik yang ditambah dengan ulasan atau analisis deskriptif serta dirangkum dalam suatu buku atau media diseminasi data yang lain. Dengan penyajian data seperti ini, diharapkan pengguna data akan lebih mudah untuk memahami kondisi dan fenomena ketenagakerjaan yang terjadi. Publikasi "Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2019" ini merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini menyajikan berbagai analisis deskriptif dari data yang telah dikumpulkan dari Sakernas Agustus 2019.

Pengumpulan data ketenagakerjaan ini dilaksanakan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei khusus yang dirancang untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan

https://babel.bps.go.id

oleh Badan Pusat Statistik tidak pernah berubah sejak 1976, kecuali untuk konsep pengganggguran terbuka dan status pekerjaan, mulai tahun 2001 mengalami perluasan.

Pada tahun 2011-2013, BPS melakukan pengumpulan data tentang ketenagakerjaan sebanyak empat kali (triwulanan) setiap tahunnya, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, setelah sebelumnya pada tahun 2007-2010, BPS melakukan pendataan Sakernas sebanyak dua kali setiap tahun yakni bulan Februari dan Agustus. Dan pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan pengumpulan data tentang ketenagakerjaan secara semesteran atau dua kali dalam setahun yakni bulan Februari dan Agustus. Pengumpulan data di bulan Februari dirancang untuk mendapatkan estimasi indikator dan keadaan ketenagakerjaan pada level provinsi, sedangkan di bulan Agustus dirancang untuk mendapatkan estimasi indikator dan keadaan ketenagakerjaan hingga level kabupaten/kota.

Mulai tahun 2016, kuesioner Sakernas sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS (*International Conference of Labour Statisticians*) ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Kondisi metodologi ini berlaku hingga Sakernas tahun 2018. Pada tahun 2019, BPS kembali menyempurnakan metodologi Sakernas dengan menambahkan konsep ICLS 20 ke dalam kuesioner Sakernas. ICLS 20 diadopsi untuk mengetahui perkembangan kondisi ketenagakerjaan dan menangkap fenomena ekonomi digital.

Pada publikasi ini, data yang digunakan adalah data Sakernas Agustus tahu 2019 dengan analisis hingga level kabupaten/kota. Untuk memudahkan pembaca, publikasi ini juga dilengkapi dengan definisi operasional yang digunakan dalam pengumpulan data dan metodologi pengumpulan data pada Sakernas Agustus 2019.

https://babelbps.go.id

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penulisan publikasi "Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2019" adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data di bidang ketenagakerjaan yang bersumber dari data hasil Sakernas Agustus 2019. Diharapkan analisis ketenagakerjaan ini mampu memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama menyangkut ketenagakerjaan.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sumber data yang digunakan dalam analisis merupakan hasil Sakernas Agustus 2019. Profil Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus Tahun 2019 merupakan analisis deskriptif yang dibatasi pada wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa aspek yang akan dibahas antara lain karakteristik demografi, pendidikan, lapangan

pekerjaan, dan pengangguran yang dirinci menurut daerah perkotaan dan perdesaan serta menurut jenis kelamin/gender.

1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, dan istilah teknis yang terdiri dari metodologi survei dan konsep definisi yang digunakan. Bagian kedua adalah gambaran umum secara ringkas mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus tahun 2019 yang dipilah berdasarkan daerah tempat tinggal maupun jenis kelamin. Bagian ketiga merupakan ringkasan dari bagian sebelumnya. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka persentase yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

1.5 Metode Survei

1.5.1 Ruang Lingkup Survei

Sakernas Agustus 2019 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga, tersebar pada 30.000 Blok Sensus (BS) di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sampel Sakernas Agustus 2019 terdiri dari 7.500 BS panel Februari dan 22.500 BS panel Agustus.

Jumlah rumah tangga sampel Sakernas Agustus 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 3.621 rumah tangga, tersebar pada 360 blok sensus di seluruh kabupaten/kota baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan rincian 90 BS panel Februari dan 270 BS panel Agustus. Rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

https://panel.bps.go.id

1.5.2 Kerangka Sampel Survei

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga. Blok sensus dalam kerangka sampel dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi, dan blok sensus komplemen (sebagai tambahan untuk estimasi kabupaten/kota pada bulan Agustus). Mulai tahun 2019 hingga 2021, Sakernas dilaksanakan secara panel blok sensus, hal ini berarti selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pencacah akan mendata pada blok sensus yang sama. Oleh karena itu, jika perubahan penduduk di blok sensus tersebut tidak terlalu besar maka sebagian besar sampel yang didata adalah sama pada tiap periodenya.

Kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan SP2010 terpilih yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (*rural/urban*).

Kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua adalah daftar 40% blok sensus SP2010 yang sudah memiliki kode strata. Strata disini adalah pengelompokan lapangan usaha yang dibentuk dari hasil SP2010. Selanjutnya strata lapangan usaha akan digunakan sebagai imlicit stratifikasi. Dan kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran disetiap blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus ini akan digunakan pada pelaksanaan Sakernas 2019-2021.

1.5.3 Rancangan Sampel

Pemilihan sampel rumah tangga dirancang dengan penarikan sampel beberapa tahap, dengan tahapan sebagai berikut:

Estimasi Kabupaten/kota

Sampel dipilih dengan metode *two stages one phase stratified sampling*, yaitu:

1. Tahap pertama: Memilih 40% blok sensus populasi secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan *size* jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
2. Tahap kedua: Memilih sejumlah *n* blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota, dengan strata lapangan usaha digunakan *sebagai implicit stratifikasi*
3. Tahap ketiga: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara systematic sampling.

Estimasi Provinsi

Sampel untuk Sakernas estimasi provinsi merupakan subsampel dari Sakernas estimasi kabupaten/kota dan dipilih menggunakan metode *two stage stratified* seperti berikut:

1. Tahap pertama: Memilih 7.500 blok sensus secara *systematic sampling* dari 30.000 blok sensus estimasi kabupaten/kota sesuai alokasi dan mempertimbangkan distribusi sampel per strata di tingkat kabupaten/kota.
2. Tahap kedua: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling*.

1.5.4 Pemutakhiran Frame Rumah Tangga

1. Untuk pelaksanaan Sakernas 2019-2021 pemutakhiran *frame* rumah tangga dilakukan pada setiap blok sensus terpilih pada setiap periode pencacahan.
2. Selanjutnya frame hasil pemuktahiran digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga dan pembentukan kelompok sampel rumah tangga.

https://bbpbl.bps.go.id

3. Hasil pemutakhiran rumahtangga Semester I 2019 akan dimutakhirkan lagi sebelum pelaksanaan semester-semester berikutnya.

1.5.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Sakernas Agustus 2019 yang ditujukan kepada individu diupayakan agar individu yang bersangkutan yang memberikan keterangan/jawaban.

1.5.6 Pengolahan Data

Pengolahan data, mulai dari tahap perekaman data (*data entry*), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya.

https://babel.bps.go.id

1.6 Konsep dan Definisi

Sama seperti pelaksanaan Sakernas sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas Agustus 2019 mempunyai tujuan utama menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja, serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun nasional.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) ke-13 tahun 1982.

Pada tahun 2013, *International Labour Organization* (ILO) menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (yang dalam ICLS ke-19 disebut dengan *work*) dengan batasan produksi yang mengacu pada *System National Account* (SNA) 2008. Pada tahun 2019, Sakernas juga mengadopsi konsep ICLS 20 untuk menyempurnakan konsep status pekerjaan dan untuk menangkap fenomena ekonomi digital.

Konsep ICLS ke-13 membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah **Angkatan Kerja** dan **Bukan Angkatan Kerja**, seperti diagram di bawah ini:

Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

1. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun dan lebih.
2. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

https://babel.bps.go.id

3. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya digunakan untuk sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dan tidak bekerja.
4. **Seseorang disebut bekerja** bila melakukan kegiatan ekonomi memproduksi barang atau jasa dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.
5. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

   Contoh**:**

   a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.

b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).

c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya

6. **Penganggur terbuka**, terdiri dari:

a. Mereka yang mencari pekerjaan.

b. Mereka yang mempersiapkan usaha.

c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. (lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

- **Seseorang digolongkan sebagai pencari kerja** apabila pada saat survei tidak punya pekerjaan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, mereka dapat terdiri dari:

  a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

  b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan.

https://kabel.bps.go.id

7. **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila ada "tindakan nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha, nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri *(own account worker)* yaitu dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar maupun dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

8. **Pengangguran Terdidik** adalah rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke atas yang dianggap sebagai kelompok penduduk terdidik.
9. **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:
   - **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
   - **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).
10. **Seseorang disebut sebagai sekolah** bila melakukan kegiatan untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. *Tidak termasuk yang sedang libur sekolah*.
11. **Seseorang disebut mengurus rumah tangga** bila melakukan kegiatan yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
12. **Seseorang disebut sebagai kegiatan lainnya** bila melakukan kegiatan selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.
13. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
14. **Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan** adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

    Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.
15. **Lapangan Pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja meliputi:
    - Sektor Primer terdiri dari Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian
    - Sektor Sekunder terdiri dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, dan Sektor Konstruksi

https://bangka.bps.go.id

- Sektor Tersier terdiri dari Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi, Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Keuangan serta Sektor Jasa-Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

16. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, mengikuti Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
17. **Upah/gaji bersih** adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya (oleh perusahaan/kantor/majikan).
18. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:
    a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
    b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
    c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
    d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
    e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun

https://kabel.bps.go.id

barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

f. **Pekerja bebas di nonpertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

   Usaha non pertanian meliputi: usaha di Sektor Pertambangan, Industri, Listrik, Gas dan Air, Sektor Konstruksi/Bangunan, Sektor Perdagangan, Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

   Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

   1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
   2) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.
   3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

19. **Kegiatan informal:** dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

https://babel.bps.go.id

Tabel 1. Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tena-ga Profe-sional	Tenaga Kepe-mimpi-nan	Pejabat Pelak-sana dan Tata Usaha	Tena-ga Penju-alan	Tena-ga Usaha Jasa	Tena-ga Usaha Perta-nian	Tena-ga Pro-duksi	Tena-ga Opera-sional	Peker-ja Kasar	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Catatan: F = Formal INF=Informal

Sumber: Sakernas Agustus 2019

https://babel.bps.go.id

https://babel.bps.go.id

KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2

PUK

Penduduk Usia Kerja (PUK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus tahun 2019 ada sebanyak **1.097.261** orang.

AK

Angkatan Kerja (AK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus tahun 2019 ada sebanyak **742.798** orang.

Bekerja
715.927 orang

Pengangguran
26.871 orang

https://babel.bps.go.id

BAK

Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus tahun 2019 ada sebanyak **354.463** orang.

Sekolah
82.178 orang

Mengurus Rumah Tangga
236.071 orang

Lainnya
36.214 orang

TPAK

TPT

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus tahun 2019 adalah sebesar **67,70** persen dan **3,62** persen

https://babel.bps.go.id

II. Analisis Ketenagakerjaan

Pembangunan ekonomi akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan menempatkan penduduk sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan, maka permasalahan kependudukan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Penduduk yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan dan ketrampilan adalah modal utama dalam pembangunan.

Dalam pembangunan penduduk tidak hanya berperan sebagai motor penggerak saja, namun juga sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, penduduk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja. Melalui indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah, akan diketahui jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai pekerja, besarnya tingkat pengangguran serta kondisi ketenagakerjaan dilihat dari sektor ekonomi.

Analisis keadaan ketenagakerjaan tentunya tidak terlepas dari kondisi penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk khususnya komposisi penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama penduduk yang masuk dalam usia kerja menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang ada.

Pertumbuhan penduduk usia kerja dapat menimbulkan dampak yang sangat komplek dengan kondisi ketenagakerjaan. Semakin banyaknya penduduk angkatan kerja berarti semakin besar sumber daya manusia yang aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja maka akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan akan berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan.

Untuk itu indikator ketenagakerjaan sangat penting untuk melihat keadaan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Dalam publikasi ini akan dibahas tentang karakteristik penduduk usia kerja, tingkat partisipasi penduduk angkatan kerja, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja dan kontribusi sektor lapangan pekerjaan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.1 Karakteristik Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang termasuk dalam kategori penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja menurut kegiatannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pada Agustus tahun 2019 penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.097.261 orang, 67,70 persen diantaranya termasuk dalam angkatan kerja dan 32,30 persen adalah bukan angkatan kerja.

https://babelbps.go.id

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dari 67,70 persen angkatan kerja, sebanyak 96,38 persen adalah mereka yang bekerja sementara sisanya sebanyak 3,62 persen merupakan pengangguran.

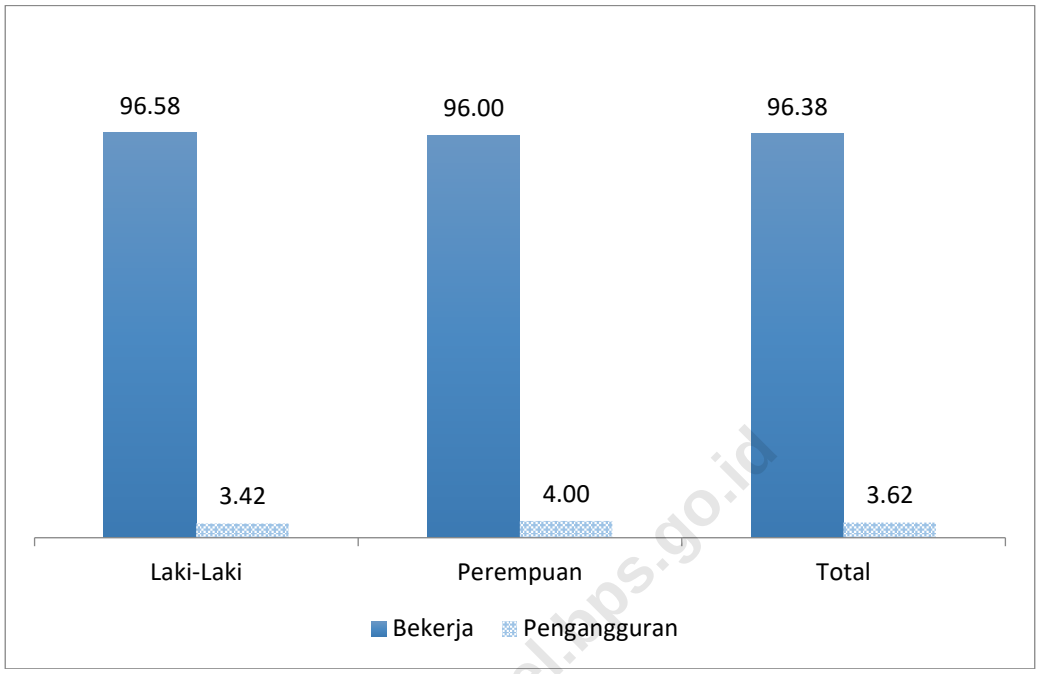

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 1. Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

https://babel.bps.go.id

Dari Gambar 1 terlihat bahwa lebih dari 96 persen penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja berstatus bekerja. Hal ini menandakan bahwa secara umum di Bangka Belitung tidak terlalu sulit mendapatkan pekerjaan. Rendahnya angka pengangguran baik laki-laki maupun perempuan di Kepulauan Bangka Belitung pada kondisi Agustus 2019 dapat dikarenakan faktor tingkat pendidikan atau pengalaman. Tingkat pendidikan yang tinggi serta ditunjang oleh pengalaman kerja yang cukup menjadikan sesorang akan cenderung "memilih" pekerjaan dan menganggur untuk sementara waktu hingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dan harapan.

Secara keseluruhan, lapangan pekerjaan di Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh laki-laki, hal ini terlihat pada gambar 2 dimana persentase laki-laki yang bekerja adalah sebesar 66,17 persen dan perempuan hanya sebesar 33,83 persen. Hal ini wajar terjadi karena dalam budaya kita mencari pekerjaan adalah tugas laki-laki dan sebagian besar perempuan masih memilih untuk tidak bekerja serta mengurus rumah tangga.

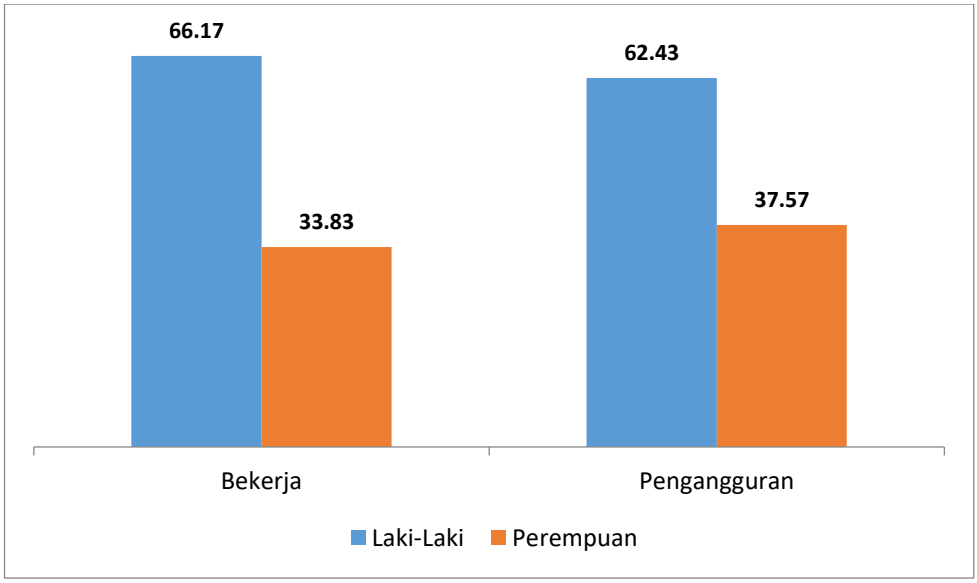

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 2. Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

https://babel.bps.go.id

Berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat bahwa persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan yaitu 66,22 persen dibandingkan 69,56 persen. Keadaan ini erat kaitannya dengan karakteristik wilayah di Kepulauan Bangka Belitung dimana daerah pedesaan lebih banyak menyerap tenaga kerja khususnya pada sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan sedangkan di daerah perkotaan penyerapan tenaga kerja lebih dominan pada sektor tersier seperti sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Kegiatan Utama	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angkatan Kerja	**83,90**	**47,45**	**66,22**	**87,21**	**49,31**	**69,56**	**85,39**	**48,25**	**67,70**
Bekerja	80,44	45,35	63,42	84,95	47,60	67,56	82,47	46,32	65,25
Pengangguran	3,46	2,10	2,80	2,26	1,71	2,00	2,92	1,93	2,45
Bukan Angkatan Kerja	**16,10**	**52,55**	**33,78**	**12,79**	**50,69**	**30,44**	**14,61**	**51,75**	**32,30**
Sekolah	7,01	7,75	7,37	6,98	8,39	7,64	7,00	8,03	7,49
Mengurus Rumah tangga	4,18	42,30	22,67	2,03	40,75	20,06	3,21	41,63	21,51
Lainnya	4,91	2,50	3,74	3,78	1,55	2,74	4,40	2,09	3,30
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas Agustus 2019
Keterangan: L=Laki-Laki, P=Perempuan, L+P=Laki-Laki+Perempuan

Tabel 2 menunjukkan persentase penduduk yang bekerja di wilayah perkotaan lebih rendah dibandingkan penduduk yang bekerja di perdesaan, yaitu 63,42 persen berbanding 67,56 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penduduk laki-laki yang bekerja di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki yang bekerja daerah perdesaan, yaitu 80,44 persen berbanding 84,95 persen. Hal serupa juga terjadi pada penduduk perempuan dimana persentase penduduk perempuan yang bekerja di perkotaan (45,35 persen) lebih rendah daripada di perdesaan (47,60 persen). Walaupun terdapat selisih, keterlibatan perempuan dalam bekerja pada Agustus 2019 adalah sebesar 46,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum hampir setengah penduduk perempuan yang masuk usia kerja adalah berstatus bekerja.

Beberapa hal yang mempengaruhi keadaan tersebut antara lain yaitu karena sektor lapangan usaha yang ada di perdesaan lebih menunjang bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan dibandingkan di perkotaan. Misalnya pekerjaan di sektor pertanian tidak memiliki peraturan jam kerja yang mengikat dan biasanya tidak dibatasi oleh kualifikasi tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Fleksibilitas jam kerja ini adalah salah satu faktor yang mendukung tingginya keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di wilayah perdesaan, mengingat biasanya pekerjaan di sektor pertanian dapat dilakukan sambil mengurus rumah tangga. Hal ini tentunya berbeda dengan sektor-sektor penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan dimana jam kerja yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga biasanya penduduk perempuan lebih cenderung mengurus rumah tangga.

Selain itu di wilayah perkotaan tingkat pendidikan dan keterampilan biasanya menjadi tolok ukur utama dalam mencari pekerjaan, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia cenderung hanya akan menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Faktor lainnya adalah tingkat penawaran dan peluang kerja di perdesaan cenderung lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan, khususnya di sektor pertanian. Sehingga penduduk baik laki-laki maupun perempuan di perdesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk dalam angkatan kerja dibandingkan penduduk di perkotaan.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan, yaitu 33,78 persen berbanding 30,44 persen. Secara keseluruhan, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berstatus mengurus rumah tangga. Sementara itu dilihat dari wilayahnya, penduduk perempuan yang berstatus mengurus rumah tangga di perkotaan sedikit lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan, yaitu 42,30 persen berbanding 40,75 persen.

https://babelbps.go.id

2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat mengindikasikan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada tahun 2019, TPAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 67,70 persen, ini berarti bahwa dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 67-68 orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 67-68 orang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

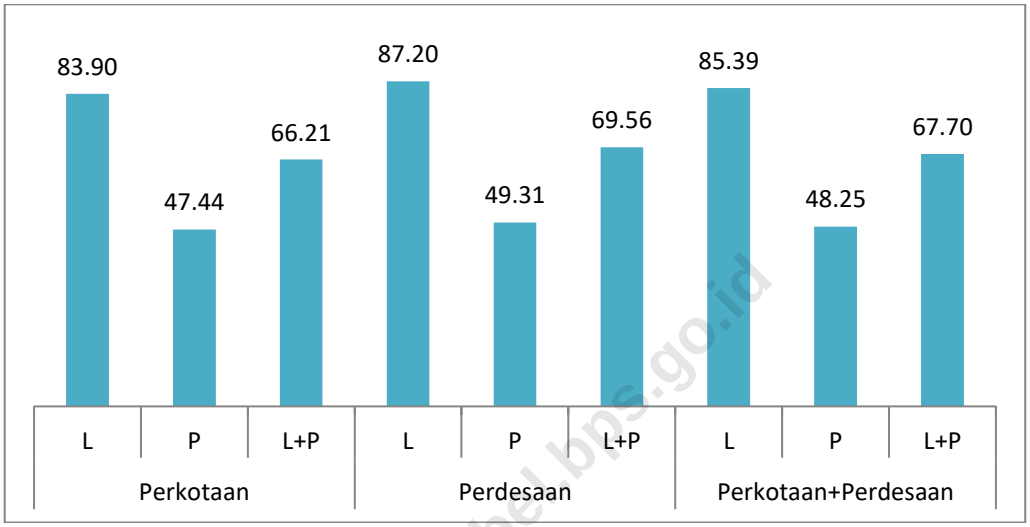

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

https://babel.bps.go.id

Pada kondisi Agustus 2019, di Kepulauan Bangka Belitung TPAK perempuan jauh lebih rendah dibanding dengan TPAK laki-laki, yaitu 48,25 persen berbanding 85,39 persen. Pola yang sama terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, dilihat dari wilayahnya TPAK di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, yaitu 69,56 persen berbanding 66,21 persen.

Gambar 3 menunjukkan bahwa baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, TPAK antara laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama yaitu di daerah perdesaan TPAK cenderung lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Agustus 2019, TPAK penduduk laki-laki di perdesaan sebesar 87,20 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 83,90 persen. Sedangkan TPAK penduduk perempuan di perdesaan sebesar 49,31 persen dan di perkotaan sebesar 47,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja di wilayah perdesaan yang terserap sebagai angkatan kerja lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.

2.2 Pendidikan Pekerja

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama dalam ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyaknya lapangan pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi pendidikan yang tinggi dan keahlian tertentu khususnya di wilayah perkotaan menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan kondisi angkatan kerja yang tersedia masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah atau spesifikasi jurusan pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada.

Berdasarkan gambar 4, pada tahun 2019 di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 44,69 persen tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tamat SD ke bawah. Dari persentase tersebut, sebesar 25,17 persen tenaga kerja di provinsi ini memiliki tingkat pendidikan tamatan SD Sederajat dan sebesar 19,52 persen belum pernah sekolah atau tidak tamat SD Sederajat. Pada waktu yang sama masih terdapat 14,99 persen penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan SMP. Sehingga jika dikumulatifkan, terdapat 59,68 persen atau hampir 60 persen penduduk yang bekerja di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berpendidikan SMP ke bawah.

https://babel.bps.go.id

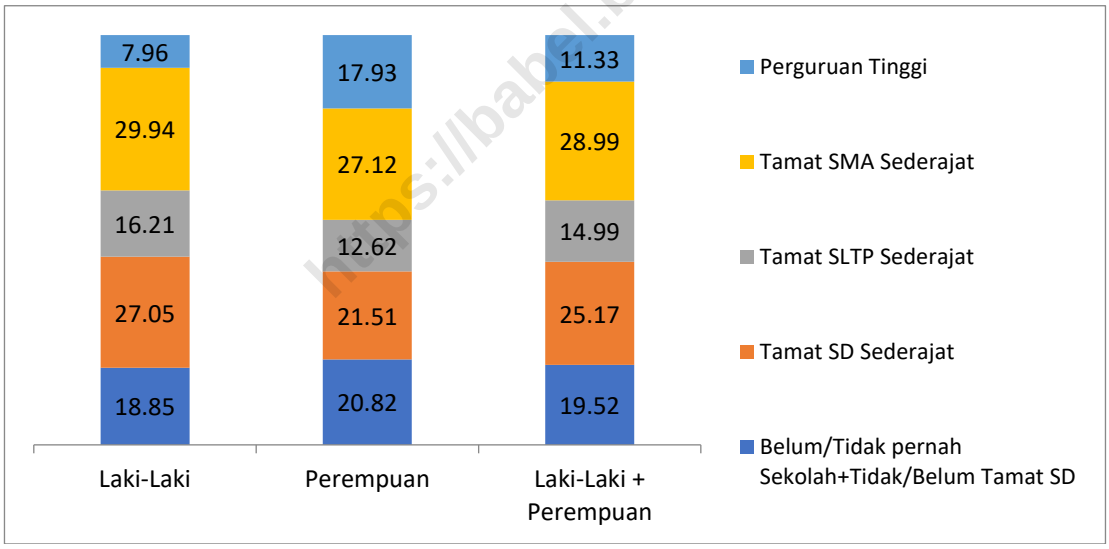

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Sementara itu, penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SMA sederajat adalah sebesar 28,99 persen dan hanya sebesar 11,33 persen tenaga kerja di Bangka Belitung yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, persentase tenaga kerja perempuan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah lebih rendah

dibandingkan pekerja laki-laki dengan jenjang pendidikan yang sama, yaitu sebesar 54,95 persen berbanding 62,11 persen. Namun demikian, untuk jenjang SMA ke atas persentase pekerja laki-laki justru lebih sedikit dibandingkan perempuan yaitu sebesar 37,89 persen untuk pekerja laki-laki dan sebesar 45,05 persen untuk pekerja perempuan.

Gambar 4 juga menggambarkan bahwa persentase tenaga kerja perempuan yang tamat perguruan tinggi lebih banyak dibanding tenaga kerja laki-laki, yaitu 17,93 persen berbanding 7,96 persen. Secara umum dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pekerja perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik dibandingkan pekerja laki-laki. Hal ini dapat dikarenakan penduduk usia kerja laki-laki lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah, dan sebaliknya.

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Blm/tdk pernah sekolah+Tdk/blm tamat SD	13,55	14,07	13,73	24,93	29,24	26,35
Tamat SD Sederajat	21,67	16,50	19,87	33,22	27,76	31,43
Tamat SMP Sederajat	16,86	12,45	15,33	15,46	12,83	14,60
Tamat SMA Sederajat	37,16	33,23	35,80	21,65	19,50	20,94
Perguruan Tinggi	10,76	23,75	15,27	4,74	10,67	6,68
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas Agustus 2019

https://kabel.bps.go.id

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sebagian besar tenaga kerja di wilayah perdesaan masih berpendidikan SMP ke bawah, yaitu sebesar 72,38 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan, jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah hanya sebesar 48,93 persen. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang cukup jauh antara tenaga kerja di wilayah pedesaan dan perkotaan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, Tabel 3 menunjukkan terdapat sebesar 69,83 persen tenaga kerja perempuan di wilayah perdesaan yang berpendidikan rendah atau dibawah SMP, sedangkan di perkotaan tenaga kerja perempuan dengan jenjang pendidikan yang sama hanya sebesar 43,02 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada pekerja laki-laki, dimana persentase pekerja laki-laki di perdesaan dengan tingkat pendidikan dibawah SMP masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, yaitu sebesar 73,61 persen berbanding 52,08 persen.

Tabel 3 juga menggambarkan bahwa di wilayah perkotaan terdapat sebesar 15,27 persen pekerja yang berpendidikan universitas/perguruan tinggi, sedangkan di wilayah perdesaan

hanya 6,68 persen pekerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Dilihat dari sebaran tingkat pendidikan, pekerja di wilayah perkotaan di dominasi oleh lulusan SMA sederajat yaitu 35,80 persen. Kondisi ini berimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 37,16 persen dan 33,23 persen. Sementara itu di wilayah perdesaan, penduduk yang bekerja masih didominasi oleh pekerja lulusan Sekolah Dasar, yaitu sebesar 31,43 persen. Dilihat dari jenis kelaminnya, pekerja laki-laki dengan lulusan SD di perdesaan juga masih mendominasi, yaitu sebesar 33,22 persen, sedangkan pekerja perempuan didominasi oleh pekerja yang tidak tamat SD sederajat, yaitu sebear 29,24 persen.

Secara umum, data yang ditunjukkan oleh tabel 3 menunjukkan bahwa karakteristik tenaga kerja di wilayah perdesaan masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa tenaga kerja di daerah perdesaan memiliki nilai tawar atau *bargaining power* yang cenderung lemah dibandingkan dengan pekerja di wilayah perkotaan.

https://kabel.bps.go.id

2.3 Kontribusi Sektor

Analisis kegiatan ekonomi biasanya menitikberatkan pada distribusi tenaga kerja menurut sektor, perubahan struktur perekonomian terutama dari sektor pertanian ke sektor sekunder atau tersier, dan penyebab perpindahan tersebut serta implikasinya. Perubahan atau pergeseran struktur tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor primer ke sektor tersier merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Keberhasilan pembangunan memiliki kaitan erat dengan kecepatan pertumbuhan sektor sekunder yang dianggap sebagai gambaran mengenai produktivitas tenaga kerja.

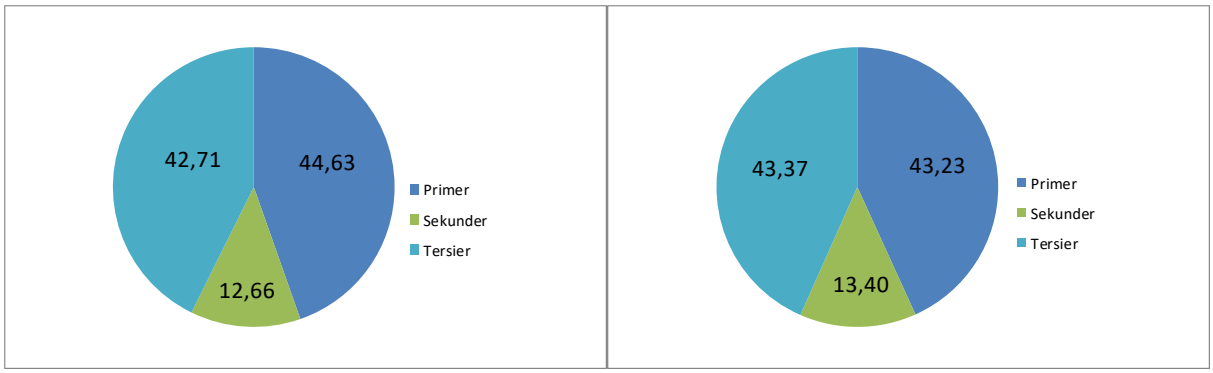

2018 2019

Sumber: Sakernas Agustus 2018 – 2019

Gambar 5. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2019

Dalam Sakernas penyerapan tenaga kerja terbagi atas 3 sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer terdiri dari lapangan pekerjaan pertanian dan

pertambangan. Sektor Sekunder yaitu terdiri dari lapangan pekerjaan Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air serta lapangan pekerjaan Konstruksi/Bangunan. Sedangkan sektor Tersier yaitu meliputi lapangan pekerjaan Perdagangan, Hotel, Restoran dan Akomodasi, lapangan pekerjaan Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi, lapangan pekerjaan Keuangan dan Jasa Perusahan serta lapangan pekerjaan Jasa Kemasyarakatan.

Pada Agustus 2019 secara umum sektor tersier masih menjadi sektor terbanyak yang menjadi penyokong utama dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sektor primer. Gambar 5 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 kontribusi sektor tersier adalah 43,36 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor primer yang sebesar 43,23 persen. Meskipun relatif imbang, kondisi ini menunjukkan adanya perubahan struktur kontirubusi pekerja dibandingkan tahun 2018, dimana penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor primer. Sedangkan kontribusi sektor ketiga yaitu sektor sekunder pada tahun 2019 yaitu sebesar 13,40 persen, naik sebesar 0,74 persen dibanding tahun 2018 yang sebesar 12,66 persen. Adanya perubahan komposisi pekerja pada tiga sektor di atas secara tidak langsung merupakan salah satu dampak rendahnya harga hasil komoditas pertanian, seperti lada, karet dan sawit, sehingga ikut mempengaruhi industri pengolahan dan perdagangan. Rendahnya harga komoditas pertanian menyebabkan sebagian pekerja sektor pertanian dan industri beralih ke sektor lain seperti perdagangan, jasa angkutan pergudangan dan lain sebagainya.

https://babel.bps.go.id

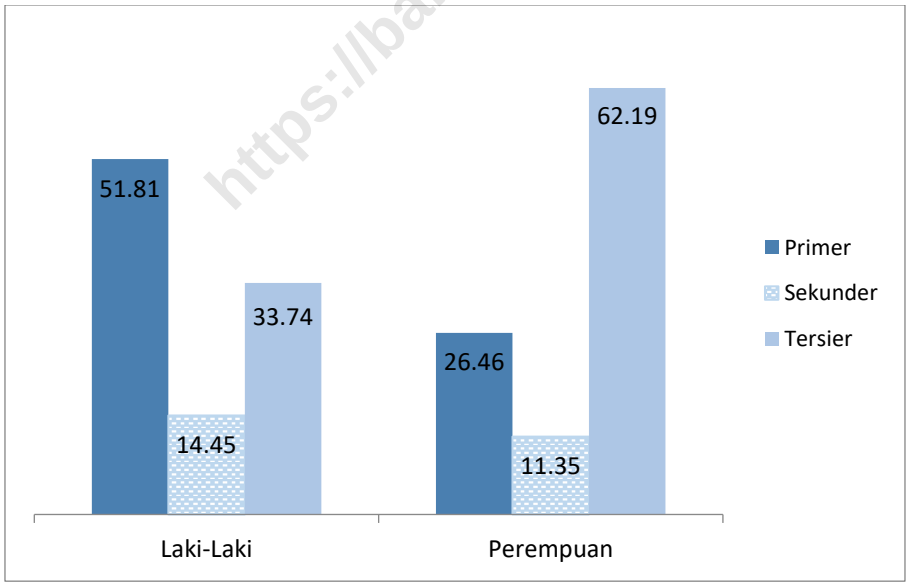

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 6. Kontribusi Sektor Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Gambar 6 menunjukkan persentase tenaga kerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor primer dan sekunder dibanding tenaga kerja perempuan (51,81 persen berbanding 26,46 persen dan 14,45 persen berbanding 11,35 persen), sementara pada sektor tersier proporsi tenaga kerja

perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 62,19 persen berbanding 33,74 persen. Hal ini dapat disebabkan karena faktor sifat dan jenis kegiatan di masing-masing sektor. Lapangan pekerjaan di sektor primer dan sekunder cenderung memiliki sifat dan jenis aktivitas yang relatif membutuhkan tenaga dan jam kerja lebih banyak dibandingkan sektor tersier. Hal ini menyebabkan tenaga kerja perempuan akan cenderung untuk lebih memilih pekerjaan yang tidak banyak menyita tenaga dan waktu karena masih harus mengurus rumah tangga, misal menjadi pedagang, penyedian makan dan minum, guru les dan lain sebagainya.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Lapangan Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Primer	32,67	8,44	24,26	73,78	48,95	65,63
Sektor Sekunder	19,96	14,25	17,98	8,13	7,72	8,00
Sektor Tersier	47,37	77,31	57,76	18,09	43,33	26,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019

https://babel.bps.go.id

Berdasarkan tabel 4 di atas, di daerah perkotaan sektor tersier menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, yaitu sebesar 79,31 persen berbanding 47,37 persen. Sedangkan di daerah perdesaan penyerapan tenaga kerja laki-laki lebih dominan pada sektor primer yaitu sebesar 73,78 persen dan perempuan hanya sebesar 48,95 persen. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya yaitu penyerapan tenaga kerja terbesar di wilayah perkotaan pada tahun 2019, berada pada sektor tersier, sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar di wilayah perdesaan berada pada sektor primer.

Hasil Sakernas Agustus 2019 juga sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan, dimana ketersediaan lapangan kerja di wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak berada pada sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan, hotel, restoran dan akomodasi, sektor angkutan, pergudangan dan telekomunikasi, serta sektor jasa perusahaan dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan di daerah perdesaan lapangan pekerjaan yang tersedia lebih dominan berada pada sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan pertambangan.

Gambar 7 memberikan informasi tentang kontribusi sektor dalam penyerapan tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari gambar terlihat bahwa sektor primer masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 64,93 persen (tidak tamat SD sebesar 29,2 persen dan tamat SD sebesar 35,73 persen). Kondisi berbeda terlihat pada sektor sekunder dan tersier, dimana kedua sektor tersebut didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMA, yaitu masing-masing sebesar 37,48 persen dan 39,01 persen.

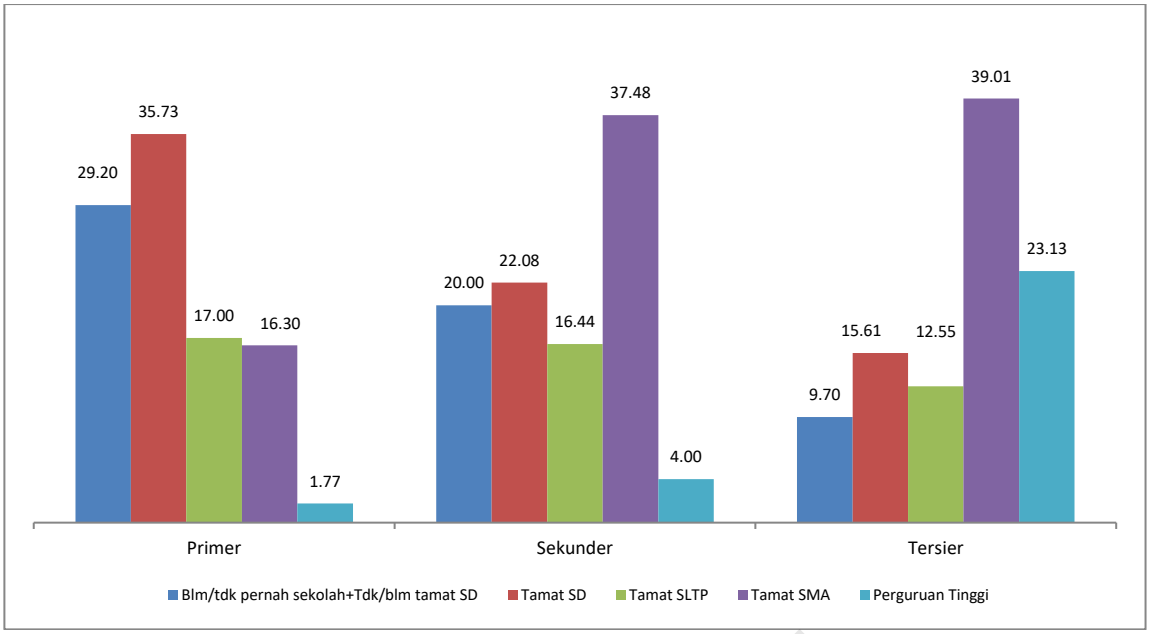

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 7. Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

https://kabel.bps.go.id

Pada sektor tersier, tingkat pendidikan pekerja selain didominasi oleh pekerja lulusan SMA sederajat, pendidikan pekerja kedua terbanyak adalah para pekerja dengan tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi, yaitu sebesar 23,13 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi di lapangan dimana lapangan pekerjaan pada sektor tersier yang cenderung membutuhkan tingkat pendidikan dan *skill* yang lebih tinggi.

Secara umum, hasil Sakernas Agustus 2019 memberikan gambaran bahwa struktur pekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sektor primer didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan pada sektor tersier sebagian besar pekerjanya telah memiliki tingkat pendidikan tinggi.

2.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan status pekerjaannya, tenaga kerja terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Tenaga kerja pada sektor formal adalah tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan dan tenaga kerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Sedangkan tenaga kerja pada sektor informal adalah tenaga kerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tidak di bayar, berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

Dilihat dari Tabel 5 tentang status pekerjaan, pada Agustus 2019 penduduk yang bekerja di lapangan kerja formal sebesar 53,81 persen dan penduduk bekerja di lapangan kerja informal

sebesar 46,19 persen. Di sektor formal persentase pekerja yang berstatus buruh atau karyawan terlihat mendominasi yaitu sebesar 47,91 persen dan untuk pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tetap/buruh dibayar sebesar 5,90 persen. Sedangkan pada sektor informal, status pekerja didominasi oleh pekerja dengan status berusaha sendiri yaitu sebesar 22,88 persen dari total 46,19 persen. Sedangkan sisanya tersebar pada pekerja dengan status pekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga.

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Status	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Formal	**63,34**	**58,98**	**61,82**	**47,46**	**37,99**	**44,35**	**55,95**	**49,63**	**53,81**
1. Buruh/karyawan	55,66	54,87	55,37	40,49	36,23	39,09	48,60	46,57	47,91
2. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	7,68	4,11	6,45	6,97	1,76	5,26	7,35	3,06	5,90
Informal	**36,66**	**41,02**	**38,18**	**52,54**	**62,01**	**55,65**	**44,05**	**50,37**	**46,19**
1. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tdk dibayar	6,44	6,34	6,41	13,37	8,82	11,88	9,67	7,45	8,92
2. Berusaha sendiri	23,92	20,48	22,73	25,27	18,57	23,07	24,54	19,63	22,88
3. Pekerja Bebas	4,81	1,12	3,53	10,03	9,59	9,89	7,24	4,89	6,45
4. Pekerja tidak dibayar	1,49	13,08	5,51	3,87	25,03	10,81	2,60	18,40	7,94
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sakernas Agustus 2019
Catatan: L= Laki-Laki P= Perempuan L+P= Laki-Laki +Perempuan

https://babel.bps.go.id

Secara umumnya salah satu ciri khas yang membedakan tenaga kerja formal dan informal adalah tenaga kerja pada sektor formal biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan para pekerja pada sektor informal. Selain itu pekerja pada sektor informal biasanya tidak memiliki keterampilan khusus. Hal lain yang biasanya membedakan sektor formal dan informal adalah jumlah upah yang diterima setiap bulan. Biasanya pekerja pada sektor formal akan menerima upah lebih teratur dalam jumlah yang relatif stabil setiap bulannya, sedangkan pekerja pada sektor informal penerimaan upah biasanya bergantung pada jumlah jam kerja atau satuan hasil yang diperoleh. Tenaga kerja formal maupun informal secara umum tersebar di seluruh sektor mulai dari pertanian, pertambangan hingga sektor lainnya.

Dilihat dari jenis kelamin, Tabel 5 memperlihatkan bahwa mayoritas pekerja yang bekerja di sektor formal adalah pekerja laki-laki, yaitu sebesar 55,95 persen dan perempuan sebesar 49,63 persen dengan status sebagai buuh/karyawan. Sementara itu, di lihat dari

wilayahnya pekerja di daerah perkotaan lebih banyak yang bekerja di sektor formal dibanding informal yaitu sebesar 61,82 persen berbanding 38,18 persen. Sebaliknya, pekerja di wilayah perdesaan lebih banyak bekerja di sektor informal dibanding sektor formal yaitu 55,65 persen berbanding 44,35 persen.

2.5 Pengangguran

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka dapat dikatakan kegiatan ekonomi di suatu daerah semakin maju, sekaligus merupakan indkasi keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya.

Namun demikian, interpretasi terkait angka pengangguran juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti indikator tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, kualitas pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kondisi ketenagakerjaan terkait pengangguran dapat diketahui melalui indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat pengangguran terdidik, dan tingkat pengangguran terselubung atau setengah pengangguran.

https://babel.bps.go.id

2.5.1 Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62 persen. Artinya dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar 3 sampai 4 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan.

Dari Gambar 8 terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan pada Agustus 2019 di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu berturut-turut sebesar 4,23 persen dan 2,88 persen. Cukup tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan dapat diinterpretasikan dari beberapa sisi. Pengangguran yang cukup tinggi dapat terjadi karena lapangan kerja yang tersedia belum cukup banyak untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia, atau dapat pula karena tingkat pendidikan yang cukup baik di daerah perkotaan menyebabkan "*bargaining power*" penduduk yang mencari pekerjaan lebih tinggi, sehingga mereka cenderung memilih pekerjaan dan berharap akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian yang dimiliki ataupun upah yang memadai.

Sebaliknya, rendahnya angka pengangguran di suatu wilayah juga belum tentu mengindikasikan penduduk wilayah tersebut telah mapan dan sejahtera. Rendahnya angka pengangguran juga dapat terjadi sebagai dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi dan

tingginya angka kemiskinan. Sehingga orang akan cenderung bekerja apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu dalam menginterpretasikan tingkat pengangguran perlu pembandingan dengan indikator-indikator yang lain.

pada Agustus 2019, rendahnya tingkat pengangguran di daerah perdesaan di Kepulauan Bangka Belitung dapat terjadi sebagai dampak rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet, lada dan sawit. Kondisi ini memungkinkan adanya perubahan struktur penduduk yang bekerja. Jika biasanya penduduk yang bekerja hanyalah kepala keluarga, namun dikarenakan tuntutan dan kebutuhan, anggota keluarga yang lain (istri atau anak) dapat ikut terlibat dalam upaya mencari nafkah dengan bekerja untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

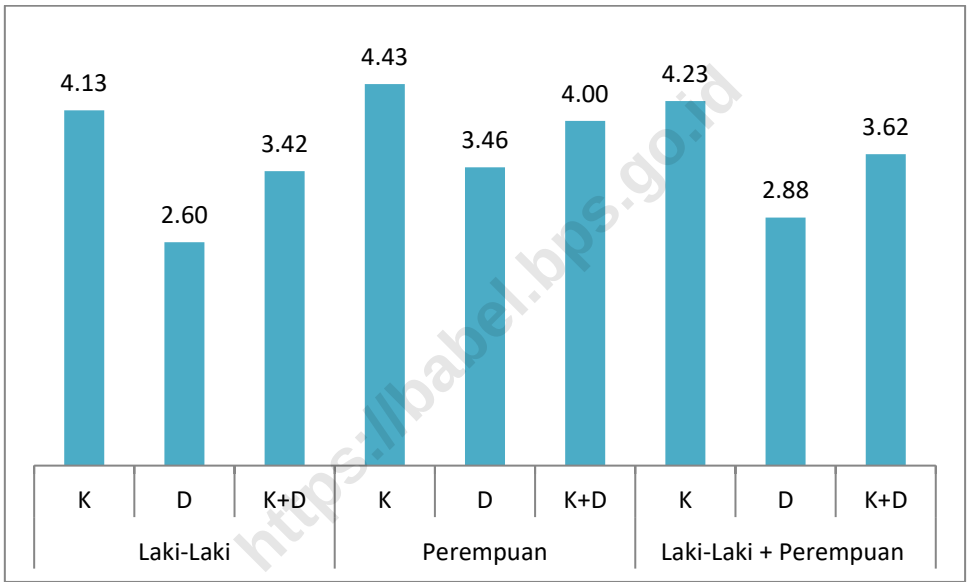

https://babel.bps.go.id

Sumber: Sakernas Agustus 2019

Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Jika dilihat dari jenis kelamin, walaupun tidak terlalu besar tingkat pengangguran laki-laki lebih rendah dari perempuan (3,42 persen berbanding 4,00). Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya yaitu rendahnya tingkat penganguran dapat dikarenakan meningkatnya peran perempuan dalam mencari nafkah. Sebelumnya tabel 5 juga memperlihatkan bahwa pada Agustus 2019 pekerja keluarga dengan jenis kelamin perempuan (18,4 persen) cukup tinggi jika dibandingkan pekerja keluarga laki-laki (2,6 persen). Rendahnya tingkat pengangguran laki-laki dibandingkan perempuan pada Agustus 2019 memperlihatkan dominasi laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga masih begitu kental dan kuat.

2.5.2 Pengangguran Terdidik

Tingkat pengangguran terdidik adalah rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke atas terhadap jumlah angkatan kerja di kelompok tersebut. Penduduk dengan tingkat pendidikan menengah ke atas dianggap sebagai kelompok penduduk terdidik. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja yang tersedia. Di sisi lain, para pengangguran terdidik biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan mereka mempunyai harapan agar dapat bekerja di tempat yang langsung menempatkan mereka di posisi yang baik, dengan fasilitas dan gaji/tunjangan yang sesuai.

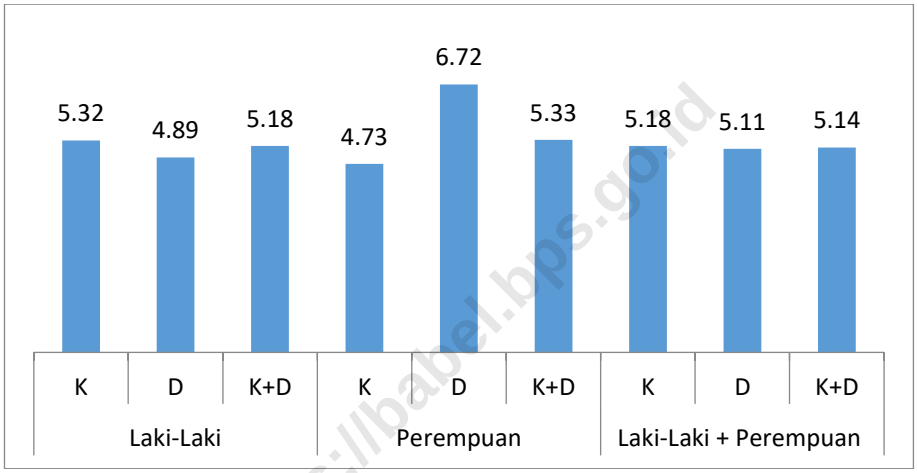

Sumber: Sakernas Agustus 2019

https://babel.bps.go.id

Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2019

Gambar 9 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,14 persen. Hampir tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran terdidik di daerah perkotaan dengan perdesaan, yaitu masing-masing 5,18 persen dan 5,11 persen. Keadaan ini menunjukkan penduduk pencari kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke atas di daerah perkotaan hampir berimbang dengan di daerah perdesaan.

Tingkat pengangguran terdidik laki-laki sebesar 5,18 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terdidik perempuan sebesar 5,33 persen. Dilihat dari wilayahnya, tingkat pengangguran terdidik perempuan di wilayah perkotaan jauh lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan, yaitu 4,73 persen berbanding 6,72 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terdidik laki-laki di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan yaitu 5,32 persen berbanding 4,89 persen.

2.5.3 Setengah Pengangguran

Selain tingkat pengangguran, indikator ketenagakerjaan lainnya yang dapat diperoleh dari Sakernas adalah tingkat setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja dengan jam kerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu. Persentase setengah pengangguran secara kasar dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar produktivitas pekerja. Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Tabel 6. Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Agustus 2019

Jumlah Jam Kerja Seminggu	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
< 35 jam	28,90	42,79	33,60
≥35 jam*	71,10	57,21	66,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019
Keterangan: *) Termasuk sementara tidak bekerja

https://kabel.bps.go.id

Tabel 6 memperlihatkan persentase jumlah pekerja yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kondisi Agustus 2019, terdapat sebesar 33,60 persen tenaga kerja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori setengah pengangguran. Atau dapat dikatakan bahwa ada sebesar 33,60 persen dari total pekerja pada Agustus 2019 adalah tenaga kerja yang bekerja dibawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu yang lalu. Sedangkan untuk tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja normal atau 35 jam atau lebih sebesar 66,40 persen.

Sementara itu dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki terlihat lebih produktif dibandingkan pekerja perempuan, tabel 6 menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 42,79 persen sementara pekerja laki-laki yang bekerja dibawah jam kerja normal hanya sebesar 28,90 persen. Ini menunjukkan bahwa secara umum, laki-laki akan lebih dominan dalam bertanggung jawab sebagai pencari nafkah dan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan lebih banyak bekerja.

RINGKASAN 3

TPAK MENURUT JENIS KELAMIN

85,39% 48,25%

TPT MENURUT JENIS KELAMIN

3,42% 4,00%

PENDIDIKAN PEKERJA

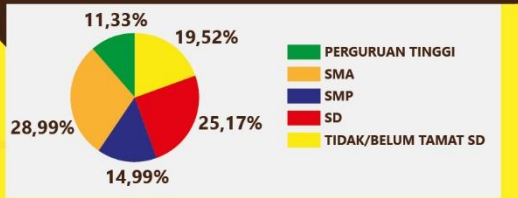

PEKERJA MENURUT JENIS KELAMIN

66,17% 33,83%

LAPANGAN PEKERJAAN

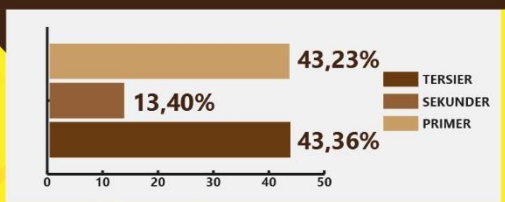

STATUS PEKERJAAN

- BERUSAHA SENDIRI — 22,88%
- BERUSAHA DIBANTU BURUH DIBAYAR — 5,90%
- BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK DIBAYAR — 8,92%
- BURUH/KARYAWAN — 47,91%
- PEKERJA BEBAS — 6,45%
- PEKERJA KELUARGA — 7,94%

SETENGAH PENGANGGURAN

KURANG DARI 35 JAM DALAM SEMINGGU
33,60%

MINIMAL 35 JAM DALAM SEMINGGU*
66,40%

* TERMASUK SEMENTARA TIDAK BEKERJA

PENGANGGURAN TERDIDIK

5,18% 5,33%

PENDUDUK USIA KERJA

- BEKERJA — 65,25%
- PENGANGGURAN — 2,45%
- SEKOLAH — 7,49%
- MENGURUS RUMAH TANGGA — 21,51%
- LAINNYA — 3,30%

http://babel.bps.go.id

https://babel.bps.go.id

III. RINGKASAN

Berdasarkan ulasan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpilah berdasarkan karakteristik maupun wilayah administrasinya bisa disimpulkan bahwa:

1. Tahun 2019 persentase penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.097.261 orang. Sebesar 67,70 persen diantaranya merupakan angkatan kerja, dengan rincian sebesar 96,38 persen diantaranya bekerja dan sisanya 3,62 persen merupakan pengangguran. Persentase penduduk yang bekerja apabila dilihat menurut gender, persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibanding penduduk perempuan.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 67,70 persen, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (48,25 persen) lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (85,39 persen).
3. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah, sebanyak 44,69 persen tenaga kerja yang ada adalah berpendidikan SD Sederajat ke bawah, 14,99 persen berpendidikan SMP Sederajat, 28,99 persen berpendidikan SMA Sederajat dan 11,33 persen berpendidikan tamat perguruan tinggi.
4. Sektor lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja secara berturut-turut adalah sektor tersier sebesar 43,36 persen, sektor primer sebesar 43,23 persen dan sektor sekunder sebesar 13,40 persen.
5. Tenaga kerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor primer dan sekunder dibandingkan tenaga kerja perempuan perempuan (51,81 persen berbanding 26,46 persen dan 14,45 persen berbanding 11,35 persen). Sebaliknya, pada sektor tersier proporsi tenaga kerja perempuan lebih banyak dibanding tenaga kerja laki-laki (62,19 persen berbanding 33,74 persen).
6. Tenaga kerja di wilayah perkotaan paling banyak terserap pada sektor tersier yaitu sebesar 57,76 persen sedangkan di wilayah perdesaan lebih terlihat pada sektor primer sebesar 65,63 persen.
7. Sektor primer masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sebesar 64,93 persen (Tidak tamat SD sebesar 29,20 persen dan Tamat SD sebesar 35,73 persen). Hal berbeda terlihat pada sektor sekunder dan tersier dimana kedua sektor tersebut didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMA, yaitu masing-masing sebesar 37,48 persen dan 39,01 persen.
8. Proporsi tenaga kerja dengan status pekerja formal yaitu sebesar 53,81 persen, sedangkan proporsi pekerja informal sebesar 46,19 persen. Tenaga kerja perempuan

https://babelbps.go.id

yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 46,57 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 48,60 persen.

9. Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2019 sebesar 3,62 persen. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPT di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan, yaitu berturut-turut sebesar 4,23 persen dan 2,88 persen. Sementara itu, TPT perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu sebesar 4,00 persen berbanding 3,42 persen.
10. Tingkat pengangguran terdidik sebesar 5,14 persen dimana tingkat pengangguran terdidik di daerah perdesaan (5,11 persen) hampir sama dengan daerah perkotaan (5,18 persen). Sementara itu, tingkat pengangguran terdidik perempuan (5,33 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (5,18 persen).
11. Pada Agustus 2019 di Kepulauan Bangka Belitung, tenaga kerja yang termasuk dalam setengah pengangguran sebesar 33,60 persen. Pekerja perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal (42,79 persen) lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja laki-laki (28,90 persen).

https://babel.bps.go.id

Sensus Penduduk 2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://babel.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
Telp : (0717) 439422, Fax : (0717) 439425
Website : http://babel.bps.go.id

9 786025 402708